

# UPAYA KOREA SELATAN MENGEMBALIKAN STATUS MITRA DAGANG PRIORITAS YANG DICABUT JEPANG PADA TAHUN 2019

I Putu Andre Dharma Putra<sup>1)</sup>, Putu Ratih Kumala Dewi<sup>2)</sup>, A.A Ayu Intan Parameswari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : andrebaskara4@gmail.com, ratihkumaladewi@unud.ac.id , prameswari.intan@gmail.com

## ABSTRACT

*This research describes South Korea's efforts to restore the status of a priority trading partner that Japan revoked in 2019. The relationship between the two countries is not good, but South Korea and Japan agreed to normalize through economic cooperation. South Korea and Japan are two advanced technology producing countries that carry out various collaborations to improve the national economy. South Korea is one of the countries given priority trading partner status by Japan to accelerate the economic wheels of the two countries. South Korea uses this status to import fluorinated polyamide, photosensitizing agent resist, and high purity hydrogen fluoride to produce advanced technology such as cellphones and televisions. In 2019, Japan revoked the status of a priority trading partner because of a conflict that threatened the flow of South Korean technology production.*

**Keywords:** *Priority Trade Partners, Technology Industry, Economic Cooperation, Coercive Diplomacy.*

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 1910, Jepang menjajah Korea Selatan yang mana masyarakat Korea Selatan melihat bahwa kondisi yang menimpa mereka sangat buruk dan menamai peristiwa tersebut sebagai “*The Dark Days*”. Selama 35 Tahun menginjakkan kaki sebagai penjajah di Korea Selatan, Jepang menerapkan berbagai kebijakan mengganti seluruh kebudayaan dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Korea Selatan dengan kebudayaan dan bahasa Jepang. Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang merupakan isu yang sangat sensitif, bahkan sampai sekarang yang diiringi juga

dengan isu perbudakan seksual wanita – wanita Korea Selatan ( Kusumastuty,2014 ). Setelah Korea Selatan merdeka, kedua negara sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan untuk mengembangkan ekonomi negara masing – masing.

Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang dalam memulihkan kondisi tersebut dimulai dengan Jepang yang meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan dan memberikan uang sebagai kompensasi kepada Korea Selatan. Hal tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat dan Pemerintah Korea Selatan dan hal tersebut berujung kepada

pembahasan tentang kerjasama ekonomi yang ingin dijalankan kedua negara. Kerjasama yang dicapai adalah pada tahun 1998 yang membuat sebuah kesepakatan kerjasama yaitu *New Japan-ROK Partnership Toward the 21<sup>st</sup> Century*. Dalam kesepakatan tersebut kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama untuk membangun negaranya masing – masing secara bersama tanpa memandang kejadian di masa lalu yang pernah terjadi (Sheen.2003).

Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang membawa kedua negara ini menyepakati sebuah kesepakatan ekspor yang diatur dalam kesepakatan mitra dagang prioritas. Kerjasama ini membuat kedua negara memiliki hubungan diplomasi yang semakin baik. Hubungan diplomasi yang dijalankan oleh kedua negara sesuai dengan situasi awal yang diinginkan kedua negara bahwa kedua negara setuju untuk menjalankan kerjasama tanpa kembali melihat masa lalu. Dengan hubungan diplomatis yang dikembangkan dapat membuat kedua negara saling menguntungkan yang mana kesepakatan ekspor ini menyepakati Jepang akan menjual *fluorinated polyamide*, *photosensitizing agent resist*, dan *high purity hydrogen fluoride* yang akan digunakan oleh Korea Selatan untuk mengembangkan bidang industri teknologi (Lisbet,2019).

Jepang memberikan Korea Selatan status sebagai negara prioritas untuk mempercepat seluruh proses pengiriman bahan – bahan tersebut . Status tersebut membuat Korea Selatan dapat mengurus perizinan

dengan waktu satu minggu yang mana sebelumnya memerlukan waktu selama 3 bulan. Dengan status tersebut Korea Selatan akan mendapatkan bahan – bahan tersebut yang akan digunakan untuk membuat layar dan chip yang mana seluruh industri tekbologi Korea Selatan bergantung kepada Jepang (Dolan.2019).

Pada tahun 2019 , terdapat permasalahan yaitu Mahkamah Agung Korea Selatan memberikan hukuman kepada Jepang, keadaan tersebut menyulut emosi Jepang sehingga Jepang memutuskan memutus status mitra dagang prioritas yang diberikan kepada Korea Selatan. Hal ini memunculkan permasalahan hubungan diplomatis yang kembali memburuk setelah melalui berbagai upaya untuk melakukan normalisasi hubungan.Korea Selatan meminta Jepang untuk mengembalikan status mitra dagang prioritas yang dicabut oleh Jepang. (Asih,Sukmonohadi.2019).

Korea Selatan merasa bahwa Jepang bertindak sangat tidak adil karena Jepang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization* (WTO). Permintaan Korea Selatan untuk mengembalikan status mitra dagang prioritas tidak ditanggapi oleh Jepang. Disatu sisi bahan – bahan yang diekspor dari Jepang ke Korea Selatan merupakan bahan yang hanya diproduksi di Jepang sehingga dengan ditanggukannya kesepakatan tersebut, industri teknologi Korea Selatan terancam tersendat (VOA.2019).

Kekacauan hubungan diplomatis yang telah diperbaiki sebelumnya oleh kedua negara membuat penurunan kualitas dari kerjasama ekonomi yang telah dibangun. Keadaan Korea Selatan yang memerlukan status mitra dagang tersebut membuat Korea Selatan akan menerapkan strategi baru dengan tujuan membuat Jepang mengembalikan status mitra dagang prioritas. Kondisi yang sangat terkena dampak besar dari kejadian ini adalah bahwa Korea Selatan menerapkan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bahwa Korea Selatan akan membuat Jepang kehilangan pasar produknya di Korea Selatan. Dengan Penerapan strategi tersebut maka Korea Selatan akan mengancam menghancurkan roda perekonomian Jepang sama seperti Jepang dengan mencabut status mitra dagang prioritas.

## **2. Kajian Pustaka**

Peneliti menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Kajian pustaka pertama adalah jurnal yang berjudul Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar milik Febriandi tahun 2018. Di dalam jurnal milik Febriandi (2018) menjelaskan bahwa penerapan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Penerapan strategi diplomasi koersif ini dilatarbelakangi oleh permintaan Arab Saudi yang diacuhkan oleh Qatar . Arab Saudi meminta kepada Qatar untuk menjaga jarak dengan kelompok – kelompok terorisme yang mana akan

mengancam keamanan regional . Strategi diplomasi koersif yang diterapkan oleh Arab Saudi dengan memberikan ancaman berupa memblokade jalur darat, udara, dan laut untuk mematikan ekonomi Qatar.

Penelitian kedua yang digunakan adalah penelitian milik Rahim yang berjudul Post-JCPOA: Diplomasi koersif Amerika Serikat *Vis-à-vis* Iran pada tahun 2019. Penelitian Rahim (2019) menjelaskan strategi diplomasi koersif yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Hal yang melatarbelakangi penerapan diplomasi koersif ini adalah karena Iran tidak mau mengikuti keinginan Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi ulang . Amerika Serikat memberikan Ancaman dengan memberlakukan sanksi pembelian dollar amerika dan pembatasan ekspor minyak yang merupakan tonggak perekonomian Iran.

## **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, situs resmi negara dan laporan dari organisasi-organisasi terkait. Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan online.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Korea Selatan dengan diberikannya status mitra dagang prioritas oleh Jepang sangat memudahkan untuk memproduksi teknologi. Ditambah dengan pemotongan waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan yang mana sebelumnya memerlukan waktu selama 3 bulan menjadi 1 minggu. Dengan dicabutnya status mitra dagang prioritas tersebut akan membuat bahan dasar yang dibutuhkan oleh Korea Selatan sangat berkurang, dan akan berpengaruh terhadap jumlah produksi dan ekonomi Korea Selatan.

Langkah yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam upaya mengembalikan status mitra dagang prioritas adalah dengan melakukan boikot terhadap produk – produk Jepang di Korea Selatan. Pemerintah memberlakukan peraturan untuk tidak membeli produk Jepang yang dijual di Korea Selatan merupakan salah satu pelaksanaan diplomasi koersif yang dipilih . Masyarakat Korea Selatan memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah dengan tidak membeli apapun produk Jepang bahkan masyarakat Korea Selatan memilih untuk menghancurkan beberapa barang produk Jepang (Nana,2020) . Korea Selatan melakukan langkah – langkah yang tertata untuk membuat tekanan terhadap Jepang berurutan.

Korea Selatan menggunakan sebuah slogan dalam memberlakukan boikot produk Jepang yaitu “*No Japan*”. Korea Selatan mulai menggunakan slogan ini dengan cara membuat

sebuah aplikasi dan website yang memberikan daftar produk Jepang yang dijual di Korea Selatan . Korea Selatan juga memberikan daftar beberapa pilihan lain atau barang pengganti yang mana merupakan baran produksi Korea Selatan . Masyarakat Korea Selatan mendukung dengan membuang barang – barang yang termasuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan. Toko dan restoran Jepang juga memasang tanda di depan pintu masuk bahwa mereka tidak akan melayani orang yang merupakan warga negara Jepang (Lee,2019). Dengan dikeluarkannya slogan “No Japan” di Korea Selatan memberikan dampak terhadap penurunan komsumtif dari Masyarakat Korea Selatan terhadap produk Jepang.

Akibat dari pemberlakuan boikot terhadap produk Jepang adalah terjadinya penurunan drastis terhadap penjualan alat transportasi dan minuman keras yang di ekspor dari Jepang. Penjualan terhadap Honda dan Toyota yang merupakan perusahaan alat transportasi Jepang mengalami penurunan penjualan sebesar 81% dan penjualan bir turun sampai 97% . Jepang mengalami kerugian besar dari pembatasan pembelian Bir di Korea Selatan karena Korea Selatan merupakan negara terbesar untuk konsumsi bir Jepang. Sebelum Korea Selatan melakukan boikot terhadap bir Jepang, pada tahun 2018 Korea Selatan mengekspor 61% dari seluruh produk bir buatan Jepang dan mendapatkan keuntungan diterima oleh Jepang sebesar \$7.2 Miliar (Joori,2019). Bir adalah salah satu

produk terbesar Jepang yang diperjual belikan di pasar Korea Selatan yang penjualannya sangat meningkat setiap tahunnya .

Penurunan penjualan bir pada tahun 2019 oleh perusahaan *Lotte Asashi* yang merupakan perusahaan terbesar yang menjual bir yang diekspor dari Jepang mengalami kerugian sebesar 50%. Hal ini dilatarbelakangi masyarakat Korea Selatan yang bersifat kooperatif terhadap keputusan pemerintah. Masyarakat Korea Selatan sepakat untuk tidak membeli merk bir Jepang sehingga membuat toko – toko mengembalikan bir tersebut . Selain minuman, beberapa perusahaan makanan Jepang juga mengalami banyak kerugian, salah satunya adalah *Ajinomoto* yang mengalami penurunan penjualan sebesar 35% di Korea Selatan. Televisi nasional dan swasta juga sepakat dengan keputusan pemerintah dengan tidak lagi menayangkan iklan yang mempromosikan hal yang berbau Jepang (Kelly,2019). Minuman keras dan Mobil Jepang adalah sektor yang mendapatkan dampak penurunan penjualan di Jepang, tetapi terdapat beberapa sektor lain yang mengalami penurunan.

Sektor lain yang mengalami penurunan yang drastis oleh pemberlakuan boikot adalah sektor pariwisata dan perusahaan milik Jepang. Pemerintah Korea Selatan memberlakukan pembatasan terhadap masyarakat Korea Selatan yang ingin mengunjungi Jepang. Respon dari masyarakat sangat kooperatif dengan membatalkan perjalanan yang sudah direncanakan untuk membuat Jepang tidak

mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan. Korea Selatan juga menolak seluruh permintaan visa yang datang dari masyarakat Jepang dan masyarakat Korea Selatan menutup paksa seluruh perusahaan Jepang dan menempelkan slogan “No Japan” dipintu perusahaan dan di beberapa tempat umum (Komeil,2019). Pembatasan terhadap barang Jepang yang biasanya laris di pasar Korea Selatan membuat pemerintah Korea Selatan harus mampu memberikan masyarakat barang pengganti untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan memberlakukan boikot terhadap produk Jepang di pasar Korea Selatan, Korea Selatan memerlukan barang substitusi terhadap produk tersebut. Beberapa barang substitusi yang direkomendasikan merupakan beberapa produk luar negeri dan juga produk dalam negeri. Salah satu barang substitusi yang berdampak memberikan positif terhadap produk dalam negeri adalah alat transportasi. Korea Selatan yang memberlakukan boikot terhadap *Toyota* dan *Honda* memberikan peluang pasar terhadap industri otomotif *Hyundai Motor Company* dan *Kia Motor Corporation* yang mana merupakan perusahaan yang berasal dari Korea Selatan. Setelah banyaknya slogan “No Japan” di Korea Selatan, membuat menghilangnya mobil – mobil yang merupakan *brand* Jepang di Korea Selatan (Jang,2020). Pemboikotan terhadap produk Jepang tidak hanya berdampak terhadap kepada penjualan tetapi juga berdampak terhadap jumlah mobil Jepang yang beredar di jalan.

Korea Selatan dengan menetapkan aturan untuk memberlakukan boikot terhadap produk buatan Jepang di Pasar Korea Selatan pada tahun 2019 telah melakukan strategi diplomasi koersif. Korea Selatan memberlakukan aturan ini karena Jepang yang tidak merespon permintaan dari Korea Selatan yang menginginkan negosiasi ulang terkait pencabutan status mitra dagang prioritas. Korea Selatan memberikan ancaman berupa pembatasan penjualan produk Jepang di Korea Selatan yang mana selama ini banyak dipergunakan. Sesuai dengan pemahaman diplomasi koersif R.P Barston (2014) dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy* menjelaskan bahwa diplomasi koersif adalah diplomasi yang bertujuan untuk mengubah keputusan suatu negara dengan memberikan ancaman, sanksi, pemutusan atau pembatalan kerjasama.

Strategi diplomasi koersif yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Jepang membuat Jepang mulai melunak terhadap permintaan Korea Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk mengembalikan status mitra dagang prioritas adalah memberlakukan peraturan boikot terhadap barang produksi Jepang Dalam buku yang ditulis oleh Bruce Jentleson (2010) yang berjudul *American Foreign Policy: The Dynamics of choice in the 21<sup>st</sup> Century* membagi negara yang melakukan diplomasi koersif sebagai *coercer state* dan negara yang diancam sebagai *target state* . Dalam konteks ini tentu saja Korea Selatan akan sebagai *coercer state* dan Jepang

sebagai *target state*. Alexander L. George (1971) dalam bukunya *The Limits of Coercive Diplomacy* memberikan pandangan bahwa permintaan, ancaman, dan tekanan waktu merupakan instrumen yang sudah pasti ada kehadirannya dalam penerapan diplomasi koersif. Begitu pun di dalam penerapan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Korea Selatan selaku *coercer state* kepada Jepang selaku *target state*.

Alexander L. George (1971) menjelaskan bahwa dalam diplomasi koersif memiliki beberapa instrument yang sudah pasti ada kehadirannya yaitu permintaan, ancaman, dan tekanan waktu. Permintaan dari Korea Selatan yaitu untuk mengembalikan status mitra dagang prioritas yang telah dicabut oleh Jepang. Ancaman yang diberikan oleh Korea Selatan terhadap Jepang adalah dengan memberlakukan peraturan untuk melakukan boikot terhadap seluruh produk Jepang yang beredar di Korea Selatan. Keadaan yang diciptakan oleh Korea Selatan melalui ancaman yang dilakukan kali ini akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi Jepang karena sektor minuman keras dan alat transportasi khususnya mobil merupakan pasar terbesar milik Jepang. Korea Selatan memilih untuk memberlakukan peraturan untuk memboikot seluruh produk Jepang karena melihat salah satu pasar terbesar produk Jepang adalah di Korea Selatan, sehingga Korea Selatan melihat peluang besar dari pemberlakuan boikot .

Instrumen ketiga dalam penerapan diplomasi koersif adalah penerapan tekanan waktu dalam melakukan diplomasi koersif. Dalam penerapan diplomasi koersif dengan media memberlakukan boikot terhadap seluruh produk Jepang yang tersebar di Korea Selatan, Korea Selatan tidak memberikan tekanan waktu kepada Jepang karena saat Korea Selatan melakukan strategi diplomasi koersif ini. Korea Selatan memberlakukan peraturan untuk memboikot seluruh produk Jepang di Korea Selatan secara langsung tanpa memberikan batasan waktu untuk memenuhi permintaan Korea Selatan. Melalui ketiga instrumen diatas, Korea Selatan melalui ancaman memberlakukan peraturan boikot terhadap seluruh produk Jepang merupakan diplomasi koersif dengan melakukan pendekatan secara *Full Ultimatum*, Korea Selatan bereaksi dengan memberikan ancaman secara langsung tanpa melalui tahapan – tahapan seperti pada pendekatan *Try and See*.

Dalam penerapan diplomasi koersif terdapat 10 faktor penting yang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan yang dikemukakan oleh Tom Sauer, yaitu *legitimate underlying objective, legitimate demand, no fear of a “slippery slope”, proportional threat, threat supported by public opinion, fear of escalation, reputation, credible time pressure, absolute motivation*, dan *relative motivation*. Melihat seluruh faktor keberhasilan yang dikemukakan oleh Sauer, Korea Selatan dalam menerapkan diplomasi koersif dengan media memberlakukan boikot terhadap seluruh produk

Jepang memiliki beberapa dari faktor – faktor tersebut. Dari 10 faktor yang dikemukakan oleh Sauer, upaya menerapkan peraturan boikot produk Jepang oleh Korea Selatan memiliki 7 faktor sebagai penentu keberhasilan. Strategi memberlakukan boikot memiliki 7 faktor penentu yaitu tujuan dasar yang jelas, Permintaan yang jelas, ancaman yang proporsional, didukung oleh publik, ketakutan adanya eskalasi permasalahan, memiliki reputasi, dan memiliki *absolute motivation*.

Tujuan Dasar yang dimiliki dari tindakan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Korea Selatan ini adalah untuk membuat industri teknologi Korea Selatan tetap berjalan seperti biasanya. Tindakan Jepang sebelumnya yang mencabut status mitra dagang prioritas merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan Korea Selatan sehingga untuk mencapai tujuan dasar tersebut, Korea Selatan meminta Jepang untuk melakukan negosiasi ulang terkait pencabutan status mitra dagang prioritas. Korea Selatan dengan terbuka mengajak Jepang untuk melakukan negosiasi sebelumnya tetapi Jepang tidak merespon sehingga Korea Selatan juga menggunakan ancaman yaitu memberlakukan boikot terhadap produk Jepang yang beredar cepat di Korea Selatan. Hal ini merupakan serangan balik dari tindakan Jepang yang menahan industri teknologi Korea Selatan. Ancaman ini membuka lebar kesempatan Korea Selatan mendapatkan status mitra dagang prioritas yang dicabut karena dampak yang diciptakan Korea Selatan akan besar melihat masyarakat Korea Selatan

sangat konsumtif terhadap produk Jepang terkhusus minuman keras dan alat transportasi.

Pemberlakuan boikot terhadap seluruh produk Jepang juga mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan beramai – ramai tidak membeli produk Jepang sehingga banyak toko – toko yang mengembalikan produk tersebut. Hal ini yang akan mendorong Jepang untuk membuat keputusan untuk mulai mempertimbangkan permintaan dari Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan bahkan tidak hanya memboikot produk Jepang, tetapi juga menutup paksa perusahaan – perusahaan Jepang dan restoran Jepang yang ada di Korea Selatan. Jika keadaan ini berlarut – larut semakin lama, kerugian bagi Jepang akan sangat besar dan akan sangat mempengaruhi pendapatan perkapita yang dihasilkan oleh Jepang.

Faktor selanjutnya akan harus menjadi konsentrasi Jepang adalah bahwa Jepang harus melihat adanya kemungkinan adanya eskalasi permasalahan. Kenyataan bahwa Korea Selatan sangat memerlukan bahan dasar semikonduktor dari Jepang membuat Jepang harus menentukan langkah selanjutnya. Korea Selatan yang mulai melakukan upaya – upaya untuk melakukan negosiasi dengan Jepang bisa saja mengembangkan industri bahan dasar tersebut . Hal ini akan menjadi permasalahan baru untuk Jepang karena Korea Selatan memiliki kemampuan untuk hal tersebut sehingga Jepang akan melahirkan saingan baru dalam pasar bahan semi

konduktor tersebut. Jika Jepang tidak bertindak cepat dalam memberikan status mitra dagang prioritas dengan cepat, Jepang bisa saja memberikan ancaman kepada diri sendiri dengan melahirkan rival baru di pasar teknologi internasional.

Korea Selatan adalah negara yang memiliki reputasi sebagai negara industri besar. Faktor tersebut memberikan dorongan kepada Jepang untuk segera merespon permintaan yang diberikan oleh Korea Selatan. Selain itu terdapat sebuah keadaan yang tercipta yang disebabkan oleh adanya peraturan boikot yaitu masyarakat akan mulai mencari barang substitusi sehingga jika Jepang tidak cepat bertindak, maka akan ada produk lain atau produk lokal Korea Selatan yang mengambil alih pasar. Hal ini adalah faktor yang sangat berbahaya bagi Jepang mengingat masyarakat Korea Selatan sudah terbiasa dengan produk Jepang sehingga jika Jepang terlalu lama menahan status mitra dagang prioritas milik Korea Selatan maka Jepang juga akan merugi.

Faktor motivasi dalam penerapan diplomasi koersif juga menjadi hal yang penting dalam pemberlakuan boikot seluruh produk Jepang di Korea Selatan. Korea Selatan jelas memiliki motivasi absolute karena Korea Selatan memenuhi banyak faktor yang mempengaruhi suksesnya sebuah diplomasi koersif. Jepang yang terlihat tidak punya pilihan karena Korea Selatan juga menutup sektor ekonomi Jepang membuat Jepang harus mulai merespon Korea Selatan sebelum Korea Selatan melakukan eskalasi masalah. Selain



itu, Korea Selatan juga memperhatikan permintaan produk industri teknologi sehingga memerlukan bahan dasar lebih cepat.

## 5. Kesimpulan

Dengan menggunakan konsep diplomasi koersif dalam melakukan analisa, dapat dilihat upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan merupakan sebuah negosiasi dengan menggunakan ancaman. Kebutuhan Korea Selatan terhadap *fluorinated polyamide*, *photosensitizing agent resist*, dan *high purity hydrogen fluoride* sangat besar dan Jepang menahan Korea Selatan untuk memproduksi teknologi. Korea Selatan memiliki ketergantungan terhadap Jepang sehingga saat Jepang mencabut status mitra dagang prioritas yang digunakan Korea Selatan untuk mempercepat proses impor.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan memberlakukan peraturan boikot terhadap barang yang beredar di pasar Korea Selatan membuat Jepang melunak. Dengan penerapan strategi tersebut, Korea Selatan berhasil membuat Jepang untuk mulai melakukan negosiasi ulang terhadap pengembalian status mitra dagang prioritas. Hal tersebut sesuai dengan harapan Korea Selatan yang mana menginginkan Jepang mengembalikan status mitra dagang prioritas. Ancaman yang diberikan oleh Korea Selatan merupakan ancaman yang sangat berbahaya dan penting bagi Jepang. Korea Selatan merupakan negara paling konsumtif terhadap produk minuman keras dan alat transportasi

milik Jepang. Korea Selatan berhasil mencari kesempatan untuk menyerang sektor ekonomi Jepang sehingga membuka pintu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Korea Selatan.

## 6. Daftar Pustaka

- Alexander L. George . 1971. *The Limits of Coercive Diplomacy*. Little Brown & Company.
- Bruce Jentleson . 2010. *American Foreign Policy: The Dynamics of choice in the 21<sup>st</sup> Century*. W. W. Norton & Company.
- R.P Barston . 2014 . *Modern Diplomacy* . Routledge .
- Febriandi . 2018 . Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Universitas Indonesia.
- Febriandi . 2018 . Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar. Universitas Indonesia.
- Kiki Nindya Asih, Masagung Sukmonohadi. 2019 . Ketegangan Jepang – Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian. Bank Indonesia
- Kusumastuty, Asri. 2014. Keputusan Korea Selatan Menunda Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Bidang Militer dengan Jepang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lisbet . 2019 . Ketegangan Hubungan Jepang – Korea Selatan dan Implikasinya. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Muhammad Halil Rahim. 2019 . Post JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-à-vis Iran. Universitas Indonesia.
- Seongho Sheen . 2003 . Japan-South Korea Relation: Slowly Lifting the Burden History. Asia Pacific Center for Securities Studies Honolulu.

- Dolan, D. 2019. The high-tech materials at the heart of a Japan- South Korea row.  
<https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-laborersfactbox/factbox-the-high-tech-materials-at-the-heart-of-a-japan-south-korea-rowidUSKCN1TX12I>  
pada 27 September 2020
- Joori Roh . 2019 . From Beers to Pens, South Korea Boycott Japanese Brand as Diplomatic Row Intensifies .  
<https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-laborers-boycott-idUSKCN1UE095>
- Kelly Kasulis. 2019 . South Korea's "No Japan" Boycott is New, But The Wounds are Old .  
<https://www.pri.org/stories/2019-08-12/south-korea-s-no-japan-boycott-new-wounds-are-old> pada 27 September 2020
- Komeil Sahoeli . 2019 . South Korea Are Canceling Vacations to Japan and Boycotting its Beer in a Trade War More Bitter than Trump's Feud with China.  
<https://www.businessinsider.com/south-koreans-boycott-japan-products-cancel-vacations-over-trade-war-2019-9?r=US&IR=T> pada 27 September 2020
- Lee Jin-Man . 2019 . South Korea Boycott of Japanese Goods of beer and Carmakers  
[.https://www.theguardian.com/world/2019/sep/04/south-korea-boycott-japanese-goods-beer-car-sales](https://www.theguardian.com/world/2019/sep/04/south-korea-boycott-japanese-goods-beer-car-sales) pada 27 September 2020
- Nana, Shibata . 2020 . South Korea Boycott hammers Sales of Japanese Consumer goods .  
<https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/South-Korean-boycott-hammers-sales-of-Japanese-consumer-goods> pada 27 September 2020
- Jang Seob Yoon . 2020 . Market Share of the Top Five Car Manufacturers in South Korea as of November 2019.  
<https://www.statista.com/statistics/805132/south-korea-leading-car-manufacturer-market-share/> pada 27 September 2020
- VOA . 2019 . Korsel Cabut Jepang dari Daftar Negara Penerima Layanan Cepat Perdagangan.  
<https://www.voaindonesia.com/a/korsel-cabut-jepang-dari-daftar-negara-penerima-layanan-cepat-perdagangan/5088367.html>